



## Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan Umum “Lebak Lebung”

Zahri Nasution<sup>1</sup>

### Ringkasan

Keterbatasan analisis ekonomi (parsial dan ahistoris) yang dilakukan oleh ekonom memberikan ruang bagi ilmuwan sosial lainnya, termasuk sosiolog untuk lebih jauh menjelaskan hubungan-hubungan tersebut, sehingga menumbuhkan sebuah disiplin yang dikenal sebagai sosiologi ekonomi. Upaya sosiologi ekonomi antara lain adalah menyediakan teori ekonomi dan masyarakat yang lebih kuat daripada teori ekonomi liberal atau ekonomi politik. Sosiologi ekonomi menjelaskan berbagai hal yang positif tentang ekonomi liberal dan ekonomi politik, yang berarti mengenalkan aspek-aspek tradisi yang dapat membantu dalam memahami proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan ekonomi masyarakat nelayan perairan umum lebak lebung menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *embeddedness-Granovetterian*. Kajian dilakukan terhadap komunitas nelayan di wilayah Desa Pedamaran, yang sebahagian besar melaksanakan penangkapan ikan di perairan umum lebak lebung Sungai Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa semula akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan dikelola oleh pemerintah Marga berubah menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan, bahkan, lebih rendah jika dibandingkan dengan upah buruh harian. Akibatnya, tindakan ekonomi yang melekat (*embeddedness*) dalam hubungan sosial pada masyarakat pedesaan Pedamaran yang selama masa pemerintahan Marga banyak berlangsung dan membudaya menjadi hilang. Kemudian, berbarengan dengan itu perkembangan ekonomi masyarakat Desa Pedamaran berubah dari sistem ekonomi berbudaya tradisional menjadi berbudaya ke arah ekonomi kapitalis. Tindakan ekonomi merupakan tindakan individu yang tidak lagi mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kecuali hanya untuk hal-hal tertentu yang bersifat adat (kebiasaan) dan adat (kebiasaan) inipun pada prinsipnya merupakan suatu “prestise” dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan nelayan tersebut dari berbudaya tradisional ke arah berbudaya kapitalis. Kemudian, tindakan ekonomi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran mengakibatkan tererosinya ikatan sosial kemasyarakatan pada komunitas nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (*embeddedness*) dalam tindakan ekonomi.

*Katakunci: tindakan ekonomi, masyarakat nelayan, hubungan sosial*

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan; dan sedang menempuh Program Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. Email: zahri\_nas@yahoo.com

## 1. Pendahuluan

Secara historis istilah ekonomi berasal dari Yunani yaitu *oikos* dan *oikonomia*, yang merujuk pada rumah tangga inti. *Oikos* dalam masa lalu dapat di kategorikan sebagai unit basis sistem sosial, dimana rumah tangga merupakan ekonomi, budaya, dan lembaga politik, dan kepemilikan laki-laki merupakan pondasi politik dan otoritas kekuasaan *patriarchal*. Dalam hal ini, Holton (1992) mengemukakan bahwa tipe institusi (lembaga) semacam ini berbeda dengan konsep ekonomi dalam dua hal, yaitu: Pertama, keluarga yang dimaksud dalam *patriarchal* merupakan kombinasi dari fungsi sosial, politik, dan budaya sepanjang keberadaan ketetapan ekonomi. Berbeda dengan keluarga modern yang cenderung untuk menghasilkan institusi khusus ekonomi. Kedua, target ekonominya tidak meliputi *pertukaran (exchange)* dengan rumah tangga yang lain melalui mekanisme seperti barter, pasar dan yang lebih maju (ekonomi uang), sehingga berlawanan dengan sistem pertukaran ekonomi modern.

Pendekatan yang lebih luas digunakan dalam mendefinisikan ekonomi adalah pendekatan yang bertujuan mengidentifikasi capaian fungsi sosial yang spesifik, terpisah dari fungsi lain yang bukan fungsi ekonomi. Strategi yang terkemuka dalam hal ini adalah mengadakan pemisahan antara *ends* (tujuan) dengan *means* (cara untuk mencapai *ends*). Definisi aktivitas ekonomi terfokus pada penyebaran *means* untuk mencapai *ends*. Sementara fungsi ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan atau kekurangan. Dalam hal ini, Holton (1992) mengemukakan bahwa bagi sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang, ekonomi merupakan permasalahan yang terkait dengan pertarungan antara hidup dan mati. Bahkan di dunia Barat, dimana daya tahan materi lebih kuat, permasalahan ekonomi mendominasi agenda perdebatan politik dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan perjuangan materi dan urgensi kehidupan sehari-hari, pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang timbul adalah bagaimana cara kita memahami struktur dan dinamika kehidupan sosial, dan pada perdebatan mengenai penataan ekonomi seperti apa yang paling baik untuk kesejahteraan manusia (Holton, 1992). Oleh karena itu, pentingnya persoalan ekonomi dalam masyarakat saat ini tercermin dari munculnya badan yang terspesialisasi dari pemikiran ilmiah sosial, melebihi apapun terkait dengan peningkatan ekonomi sebagai profesi yang nyata. Para ekonom telah mencoba memahami pemanfaatan ekonomi, dan memberi saran pada individu dan pemerintah dalam hal bagaimana upaya terbaik untuk mengamankan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama ekonom juga belum berhasil mencapai monopoli efektif dari diskusi tentang persoalan ekonomi.

Ada dua alasan mengapa ekonom belum berhasil mensejahterakan masyarakat. *Pertama*, kebanyakan ekonom memiliki karakter abstrak dan matematis, terfokus pada persoalan teknis yang terselubung daripada masalah ekonomi sebagaimana yang mereka rasakan dalam diskusi kebijaksanaan dan kehidupan sehari-hari. Leontief (1985) dalam Holton (1992) mengemukakan sebuah

analisa artikel di *American Economic Review* pada tahun 1970-an, melaporkan bahwa 50 persen dasar analisa menggunakan pendekatan matematika murni tanpa data empiris sama sekali, sementara 22 persen mengandung data yang hanya “diambil” tanpa tersusun secara sistematis. *Kedua*, kurangnya kontrol yang efektif oleh ekonom dalam diskusi ekonomi adalah kemauan non-ekonom untuk membentuk hubungan antara ekonomi dan masyarakat luas. Termasuk pula hubungan interaktif antara ekonomi, sistem politik, dan nilai serta norma dan budaya yang lebih luas.

Keterbatasan analisis ekonomi (parsial dan ahistoris) yang dilakukan oleh ekonom memberikan ruang bagi ilmuwan sosial lainnya, termasuk sosiolog untuk lebih jauh menjelaskan hubungan-hubungan tersebut, sehingga menumbuhkan sebuah disiplin baru yang dikenal sebagai sosiologi ekonomi (*economic sociology*). Dengan demikian, terlihat bahwa dalam mengkaji fenomena ekonomi, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan ekonomi, tetapi diperlukan pendekatan sosiologi, yang dikenal dengan sosiologi ekonomi.

Upaya sosiologi ekonomi antara lain adalah menyediakan teori ekonomi dan masyarakat yang lebih kuat daripada teori ekonomi liberal atau ekonomi politik. Tujuan dari pengembangan sintesa ini menggambarkan bentuk terbaik ekonomi liberal dan ekonomi politik, serta integrasinya dalam pengertian ekonomi dan masyarakat sebagai sesuatu yang kompleks. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengklarifikasikan secara tepat mana bagian dari liberalisme dan ekonomi politik yang dapat diterima sebagai bagian dari ekonomi dan masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi ekonomi menjelaskan berbagai hal yang positif tentang ekonomi liberal dan ekonomi politik, yang berarti mengenalkan aspek-aspek tradisi yang dapat membantu dalam memahami proses diferensiasi dan integrasi. Setiap proses mungkin pada akhirnya akan dirinci untuk tujuan-tujuan analisis sampai kepada berbagai hubungan masyarakat yang terdiferensiasi secara luas hingga ke persoalan internal ekonomi. Persoalan tersebut antara lain adalah produksi, konsumsi, investasi dan tabungan serta berbagai hubungan yang integratif dari ekonomi dan masyarakat, termasuk politik dan nilai-nilai budaya.

Tulisan ini mengemukakan perkembangan ekonomi masyarakat nelayan perairan umum lebak lebung menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori embeddedness-Granovetterian. Dalam teori ini, tindakan ekonomi merupakan bentuk dari tindakan sosial. Kemudian, tindakan ekonomi terbentuk karena bekerjanya kekuatan-kekuatan faktor sosial yang bekerja secara terus-menerus dan tidak pernah terbebas oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ikatan emosional, kekuasaan dan budaya. Kajian dilakukan terhadap komunitas nelayan di wilayah Desa Pedamaran, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan di perairan umum lebak lebung Sungai Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

## 2. Masyarakat dan Ekonomi: *Pertanyaan kajian*

Yang dimaksud dengan memposisikan masyarakat dan ekonomi dalam hal ini adalah bagaimana perkembangan kajian terhadap masyarakat dan ekonomi, termasuk kajian sosiologi ekonomi. Dalam hal ini, Polanyi (1977) dan Sahlin (1972) menyatakan bahwa banyak masyarakat masa lampau yang kekurangan yang tak dapat dipuaskan, dan tidak beranggapan bahwa sumber daya diperlukan untuk mencukupi berbagai kekurangan ini (dalam Holton, 1992). Berkaitan dengan kelangkaan tersebut, Polanyi juga mengatakan bahwa ada konflik fundamental antara apa yang disebut dengan *definisi formal* dari ekonomi yang berbasis dugaan terhadap kelangkaan sarana / cara (*means*) dan memandu kepada sumber daya ekonomi. Sementara *definisi substantif* adalah definisi ekonomi berbasis bentuk kegunaan historis dalam penyebaran sumber daya material untuk memenuhi kekurangan berbagai kebutuhan hidup manusia. Definisi formal dipakai oleh ekonom dalam mendefinisikan ekonomi dalam arti tindakan rasional, dan definisi substantif memaknai ekonomi sebagai sesuatu yang tampil secara intuitif dan berpusat di sekitar gagasan tentang pencapaian nafkah kehidupan.

Beberapa pemaknaan dan konseptualisasi tentang ekonomi dengan asumsi bahwa semua masyarakat mempunyai ekonomi, meskipun secara substantif kehidupan ekonomi berubah setiap saat. Dalam hal ini terlihat pembahasannya pada dimensi yang berbeda dalam melihat proses diferensiasi. Pada penelitian historis dan ketercukupan teoritis Polanyi mengenai transformasi besar ekonomi *embeded (embedded economy)* terdiferensiasi dan kemudian terintegrasi kembali dalam kehidupan sosial. Menurut Polanyi, bahwa ekonomi dalam masyarakat praindustri melekat dalam institusi sosial, politik, dan agama (Holton, 1992). Ini berarti bahwa fenomena perdagangan dan uang di pasar diilhami oleh tujuan selain mencari keuntungan.

Holton (1992) juga mengemukakan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat praindustri diatur oleh resiprositas dan redistribusi. Mekanisme pasar tidak diperkenankan mendominasi kehidupan ekonomi. Oleh karena itu permintaan dan penawaran lebih merupakan otoritas politik. Lain halnya dalam masyarakat modern, pasar memiliki kekuatan dalam menetapkan harga. Sementara, dalam membahas keterlekatan ekonomi dalam masyarakat, Polanyi mengajukan tiga tipe proses ekonomi, yaitu resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. *Resiprositas* menunjukkan gerakan diantara kelompok simetris yang saling berhubungan. *Redistribusi* merupakan gerakan yang bergerak ke arah pusat kemudian didistribusikan kembali, karena adanya kekuatan politik yang terpusat. Sementara *pertukaran*, merupakan perekonomian yang berlangsung antara tangan-tangan di bawah pasar dengan mekanisme permintaan dan penawaran.

Di lain pihak, Mann (1986) mengemukakan terdapat empat diferensiasi sebagai sumber kekuasaan, yaitu 1) ideologi, 2) ekonomi, 3) militer, dan 4) politik. Pendekatan multidimensi ini lebih menitikberatkan hubungannya dengan

kekuasaan dibandingkan dengan fungsi sosial, karena Mann yakin bahwa fungsi sosial tidak akan pernah berhasil tanpa dilembagakan dalam jaringan kekuasaan. Apa yang dimaksudkan Mann dengan sumber kekuasaan memiliki kesamaan dengan fungsi terhadap apa yang dinyatakan Parson dan Semler sebagai kunci berbagai kehidupan sosial. Mann kemudian berargumen bahwa tidak ada satupun dari sumber kekuasaan tersebut mendominasi secara umum. Pendekatan multidimensional terhadap diferensiasi inilah yang mengawali pergeseran perdebatan kaum *materialis* dan *idealis*.

Diferensiasi fungsional merupakan kunci dalam analisis diferensiasi sosial. Yang pertama kali muncul adalah isu teori ekonomi dan masyarakat, yang dalam ekonomi reduksionisme, tidak dapat didukung, kemudian menjadi sangat penting untuk diklarifikasi bagaimana ekonomi dan masyarakat berinteraksi. Dan bagaimana membedakan tindakan ekstra ekonomi yang berpengaruh dan merubah hubungan ekonomi. Kedua, proses diferensiasi yang melibatkan *diferensiasi praktek budaya dan persepsi*. Dalam hal ini ada perbedaan pengaruh budaya, khususnya antara masyarakat yang fungsi ekonominya *embedded* dalam hubungan sosial yang luas. Indikator lain *diferensiasi ekonomi* dari masyarakat adalah pandangan yang melihat kehidupan ekonomi sebagai wilayah kekuatan bagi perubahan sosial dan membentuk tujuan atau harapan manusia.

Perkembangan ekonomi pedesaan yang dikaji adalah pedesaan nelayan di wilayah Desa Pedamaran. Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan nelayan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan di perairan umum lebak lebung di Sungai Lempuing, dan bermukim di wilayah Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pertimbangan lainnya, adalah bahwa pengelolaan akses sumber daya perikanan oleh Pemerintah Kabupaten, lebih banyak berpihak terhadap kepentingan pemerintah daerah yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengaturan yang mengutamakan PAD ini, tidak banyak berpihak kepada masyarakat nelayan. Dalam hal ini, akses hanya dapat diperoleh dengan kapital yang besar, sementara masyarakat nelayan tidak mampu untuk membayar tunai dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, mulai adanya berbagai kepentingan terhadap sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung (PULL) (pemerintah, nelayan, pemilik modal) di wilayah Desa Pedamaran ini.

Dampak lebih lanjut pada tingkat pengusaha sumber daya perikanan antara lain adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan pada sumber daya perikanan yang dilelangkan. Bahkan, pendapatan masyarakat nelayan di wilayah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan upah buruh harian, di sekitar wilayah pemukiman nelayan tersebut. Dengan demikian, terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi masyarakat nelayan dan kondisi struktur ekonomi

pedesaan nelayan serta pengelolaan akses sumber daya oleh pemerintah daerah setempat, timbul pertanyaan sebagai berikut;

- 1). Apakah perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi masyarakat nelayan tersebut.
- 2). Apakah perkembangan ekonomi masyarakat nelayan dalam wilayah Desa Pedamaran berpengaruh terhadap hubungan sosial pada masyarakat desa Pedamaran, terutama kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan pada komunitas nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (*embeddedness*) dalam tindakan ekonomi.

Data yang menjadi dasar kajian ini berasal dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Disamping itu, didasarkan observasi dan pengamatan penulis yang pernah selama satu tahun (1987-1988) berdiam dan hidup bersama nelayan di perairan Lubuk Lampam, Sungai Lempuing. Kemudian selama periode 1988 hingga 1998, penulis juga mengadakan kegiatan penelitian sosial ekonomi pada pedesaan masyarakat nelayan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir (2001-sekarang ini), juga aktif melaksanakan kegiatan penelitian pada pedesaan masyarakat nelayan perairan umum di beberapa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini berfungsi sebagai upaya verifikasi aktualitas kondisi masyarakat nelayan tersebut.

### **3. Peran Strategis Sumber Daya Perikanan**

Perairan umum lebak lebung (PULL) adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya. PULL merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan (Welcomme, 1979). Secara garis besar, habitat utama pada PULL dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe habitat yaitu bagian sungai utama, lebak kumpai, rawang dan talang (Arifin dan Ondara, 1982).

Dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Prop. Sumsel), perairan umum lebak lebung merupakan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Propinsi Sumatera Selatan, sekitar 65 persen wilayahnya berupa rawa, payau, lebak, dan sungai yang berpotensi besar sebagai produsen ikan air tawar. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung di Prop. Sumsel sejak lama (Arsyad, 1982). Pada wilayah Kab. OKI, saat ini pengaturan tersebut berpedoman kepada Perda Kab. OKI No. 16

Tahun 2003 tentang Lelang Lebak Lebung di Kab. OKI Propinsi Sumatera Selatan.

Suatu hal penting yang menjadi pertimbangan pengaturan lelang lebak lebung ini adalah agar tidak terjadi perebutan sumber daya di antara nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan, disamping bertujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nasution, 1990). Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2003, lelang lebak lebung memberikan kontribusi sebesar Rp3 526 272 500 atau 38.75 persen dari total pemasukan PAD Kab. OKI yang merupakan sumber PAD terbesar (Nizar, 2005). Oleh karena itu, berdasarkan pengaturan yang dikemukakan terlihat bahwa pelelangan sumber daya perikanan PULL merupakan sumber utama PAD dalam wilayah Kab. OKI. Kemudian, usaha penangkapan ikan di PULL merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan di wilayah ini. Oleh karena itu, kedua kepentingan tersebut berkompetisi terhadap upaya pelestarian sumber daya perikanan PULL.

Dengan adanya berbagai kepentingan terhadap sumber daya perikanan PULL tersebut, maka kerja sama dalam kerangka pemenuhan kepentingan berbagai pihak seyogyanya merupakan tujuan yang diharapkan tercapai dalam pemanfaatan sumber daya perikanan PULL tersebut. Pertimbangan lainnya adalah bahwa menangkap ikan atau menjadi nelayan merupakan pekerjaan sebagian terbesar masyarakat Sumsel, terutama di Kab. OKI, yang sudah berlangsung sejak lama, sehingga menjadi "*way of life*" bagi mereka. Sementara akses penangkapan ikan di perairan umum di Prop. Sumsel, terutama lebak lebung dan sungainya<sup>2</sup> diatur melalui sistem pelelangan memiliki kelemahan juga.

Kelemahan tersebut antara lain diizinkan warga yang bukan nelayan ikut serta dalam pelelangan (Zain, 1982). Hal ini menyebabkan hak usaha penangkapan ikan pada sebagian besar perairan di Kab. OKI diperoleh pedagang (bukan nelayan) (Nasution *et al*, 1992; Sripo, 2002). Akibatnya nelayan memperoleh hak penangkapan ikan dari pedagang tersebut. Pada kondisi tersebut, walaupun nilai ikan hasil tangkapan nelayan cukup tinggi, namun pendapatan nelayan masih tetap saja rendah sebagai akibat tingginya nilai akses usaha penangkapan ikan di perairan tersebut (Nasution dan Dharyati, 1999; Sripo, 2002).

Dengan demikian, sistem alokasi akses sumber daya perikanan di PULL di Sumatera Selatan yang dijalankan melalui sistem pelelangan terbuka secara umum dan biaya perairan dan harus dibayar tunai pada awal tahun terlihat

---

<sup>2</sup> Lebak lebung dan sungainya adalah terjemahan dari *river flood plain area* yaitu satu kesatuan perairan umum yang memiliki perubahan tinggi air sesuai dengan musim penghujan dan kemarau (Welcomme, 1979). Di wilayah ini produktivitas sumberdaya perikanan lebih tinggi daripada ekosistem perairan sungai lainnya, sehingga di wilayah Propinsi Sumatera Selatan sejak lama dijadikan objek lelang. Pelelangan dilakukan secara terbuka pada akhir tahun dengan cara layaknya lelang barang umumnya.

tidak berpihak kepada masyarakat nelayan, karena nelayan secara umum tidak mempunyai modal secara tunai (Nasution *et al*, 1995). Untuk itu, "tindakan rasional para aktor (pemerintah daerah, masyarakat nelayan dan pedagang) dalam membentuk sistem atau organisasi sosial (sistem pelelangan akses sumber daya perikanan)" yang dikemukakan dalam perspektif-teoritik Weber perlu menjadi dasar pertimbangan dalam sistem pelelangan akses sumber daya perikanan tersebut. Hal ini bertujuan agar perkembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang diamanatkan dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan perikanan berkelanjutan (keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi).

## **4. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan**

### **4.1. Perubahan Akses dan Erosi Hubungan Sosial**

Awal perubahan sistem pemerintahan sistem Marga kepada sistem Desa adalah adanya sentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini sebagai akibat banyak perbedaan pembatasan antara pengertian yang beraneka ragam di Indonesia seperti desa (di Jawa), marga (Lampung, Sumsel, Jambi), nagari (Sumatera Barat), kampung dan mukim terutama dalam hubungannya dengan batas wilayah kesatuan masyarakat terkecil (Soemardjan and Breazeale, 1993). Untuk itu, sejak tahun 1979 tentang dikumandangkan supaya adanya pembentukan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya UU RI No. 5 Tahun 1979, yang di Kabupaten Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan selesai penataannya pada tahun 1982.

Bersamaan dengan perubahan pembatasan wilayah kesatuan masyarakat terkecil tersebut, ketetapan lelang lebak lebung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.705/KPTS/II/ 1982 tanggal 5 Nopember 1982 dilimpahkan pula wewenang pelaksanaan dan pengawasan lelang lebak lebung kepada Pemda Kabupaten dalam wilayah Prop. Sumsel (Nasution *et al*, 1995). Surat Keputusan ini hampir sama isinya dengan Perda No.8/Perdass /1973/1974 kecuali tentang memperjelas pembagian hasil lelang dimana 70 persen nilai hasil lelang perairan menjadi penerimaan pembangunan dalam APBD Tingkat II sebagai PAD subsektor perikanan. Disamping itu panitia lelang bukan lagi Pasirah tetapi diganti dengan Camat Kepala Wilayah Kecamatan dan panitia pengawas adalah Bupati Kab. OKI. Beberapa perbedaan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 memperlihatkan banyak hal yang berubah jika dibandingkan antara dua periode kondisi pengelolaan akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan PULL di wilayah Kab.OKI Prop. Sumsel. Pada masa pemerintahan Marga (sebelum tahun 1982), kondisi akses sumber daya perikanan PULL banyak yang mempertimbangkan rasa keadilan dan hubungan sosial diantara anggota masyarakat, meskipun sebenarnya dari segi ekonomi menjadi tidak rasional. Beberapa hal yang terkait tersebut bahkan terdapat kondisi yang hilang atau tererosinya pertimbangan hubungan sosial

dalam tindakan ekonomi masyarakat pedesaan, bahkan sesama nelayan dalam satu kelompok atau kerabat sekalipun.

Tabel 1 Beberapa gambaran perbedaan kondisi sebagai akibat adanya perubahan kelembagaan pengelola sumber daya perikanan perairan umum lebak lebug di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Komponen Pembeding	Masa Pemerintah Marga (hingga 1982)	Masa Pemerintah Kabupaten (setelah 1982)
Pelaksana pelelangan perairan umum lebak lebug	Diatur langsung oleh Pasirah yang berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan Marga dan tidak ada campur tangan pemerintahan yang lebih tinggi.	Diatur langsung oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten (Bupati) yang pelaksanaannya diserahkan kepada Camat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pelelangan di wilayah kecamatannya.
Pemanfaatan uang hasil lelang perairan umum lebak lebug	Sepenuhnya menjadi pendapatan marga yang memiliki perairan yang dilelangkan dan digunakan secara otonom oleh pemerintahan marga yang bersangkutan ( <i>mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan wilayahnya, terutama sarana umum</i> ).	Menjadi hak pemerintah kabupaten dan kemudian dikembalikan sebesar 10% untuk seluruh desa-desa dalam wilayah kabupaten tersebut, meskipun desa tersebut tidak mempunyai objek perairan yang dapat dilelangkan ( <i>tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal di tingkat kecamatan, kira-kira setara Marga</i> ).
Harga awal perairan umum lebak lebug yang dilelangkan	Dimulai dari penawaran terendah. Tidak ada harga standar perairan yang akan dilelang dari pemerintah marga setempat ( <i>mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam masyarakat dan kondisi sumber daya</i> ).	Ada harga standar perairan yang akan dilelangkan dari pemerintah kabupaten setempat dan harga standar tersebut meningkat 10% dari harga jual tahun lalu ( <i>tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam masyarakat dan kondisi sumber daya</i> ).
Peserta lelang perairan yang berhak mengadakan penawaran di dalam pelelangan perairan umum lebak lebug	Dibatasi hanya diikuti oleh masyarakat nelayan yang bermukim dalam wilayah marga setempat. ( <i>mempertimbangkan masyarakat lokal yang memiliki sumber daya</i> )	Juga diikuti oleh mereka yang bukan nelayan (pedagang) dan tidak hanya diikuti oleh masyarakat setempat (pedagang luar kecamatan) ( <i>tidak mempertimbangkan masyarakat yang memiliki sumber daya</i> ).
Pemegang akses hak penangkapan ikan	Lebih banyak oleh masyarakat nelayan ( <i>mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat</i> ).	Lebih banyak oleh masyarakat pedagang (pemilik modal) ( <i>tidak mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat</i> ).
Sewa nelayan yang menangkap ikan secara perorangan pada perairan umum lebak lebug	Murah dan menguntungkan bagi nelayan perorangan (sewa perairan agak berbeda berdasarkan kekerabatan, <i>embeddedness</i> ). Ikan dapat dijual bebas.	Sewa perairan meningkat dan tidak ada lagi pengurangan harga berdasarkan kekerabatan ( <i>embeddedness hilang</i> ). Ikan harus dijual kepada pemegang lisensi hak penangkapan ikan (umumnya pedagang).

Komponen Pembeding	Masa Pemerintah Marga (hingga 1982)	Masa Pemerintah Kabupaten (setelah 1982)
Menangkap ikan untuk keperluan makan sehari-hari anggota masyarakat.	Banyak dilakukan anggota masyarakat desa, meskipun bukan nelayan dan tanpa dipungut bayaran (sewa). ( <i>ada tindakan ekonomi yang melekat dalam hubungan sosial sesama anggota masyarakat</i> ).	Hanya dilakukan anggota masyarakat desa yang memiliki hubungan darah dengan pemilik akses yang dapat melakukannya ( <i>ada pembatasan atau erosi tindakan ekonomi yang melekat dalam hubungan sosial sesama anggota masyarakat</i> ).

Sumber: Data primer

#### 4.2. Tingkat Pendapatan dan Erosi Sistem Bagi Hasil

Bagi masyarakat nelayan, proses perubahan akses terhadap sumber daya perikanan tersebut merupakan penyebab terjadinya perubahan kondisi ekonomi (pendapatan) mereka. Perubahan yang terjadi adalah semakin mahalnya harga perairan yang harus dibayar oleh masyarakat nelayan dan ditetapkannya harga standar yang nilainya sama dengan harga jual tahun lalu. Padahal, pada masa sebelumnya tidak ada harga standar demikian. Pada kondisi ini terjadi ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam memiliki akses penangkapan ikan di perairan umum lebak lebung tersebut. Akibatnya masyarakat nelayan mendapatkan hak akses usaha penangkapan ikan dari pedagang dengan harga yang tinggi, sehingga meskipun nilai ikan hasil tangkapan tinggi pendapatan nelayan tetap saja rendah (Tabel 2). Oleh karena itu, tindakan ekonomi yang sebelumnya terkait dengan hubungan sosial (*embeddedness*) banyak dimiliki masyarakat nelayan, menjadi hilang dan atau berkurang (*tererosi*).

Tabel 2 menggambarkan bahwa dari 3 perairan contoh di Sungai Lempuing diketahui bahwa nilai ikan hasil tangkapan nelayan berkisar antara Rp6 422 000 hingga Rp25 378 000; per kelompok nelayan per tahun. Sedangkan pendapatan nelayan hanya berkisar Rp198 200; per orang per tahun hingga Rp937 500; per orang per tahun. Dengan demikian, jika dilihat rata-rata jumlah hari kerja, nelayan tersebut bekerja sekitar 220-240 hari dalam tahun 1993. Hal ini berarti mereka hanya menerima upah sebagai tenaga kerja dalam penangkapan ikan pada tiga perairan masing-masing berjumlah Rp898.9; Rp1 562.5 dan Rp4 4261.4 per hari. Dua nilai terendah pertama adalah lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan upah buruh atau upah pembuat alat tangkap ikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar Rp3 000 per hari pada masa itu.

Tabel 2. Nilai ikan hasil tangkapan, biaya operasional penangkapan ikan, sewa perairan dan pendapatan nelayan pada beberapa perairan di Sungai Lempuing.

Uraian	Nilai (Rupiah)		
	I	II	III
A. Nilai ikan hasil tangkapan	6 422 000	25 378 000	22 000 000
B. Investasi			
- Alat tangkap	717 500	3 685 000	3 200 000
- Tempat tinggal di perairan	100 000	650 000	850 000
- Perahu	210 000	1100 000	550 000
- Perahu bermotor	1 000 000	1500 000	1450 000
C. Biaya Operasional			
- Bahan bakar, rotan, tali, dll	722 000	6 000 000	5 318 400
- Tenaga kerja	700 000	378 000	1 200 000
- Sewa perairan	3500 000	11500 000	13 500 000
D. Pendapatan ( A-C )			
- Kelompok	1500 000	7 500 000	1 982 000
- Per Anggota	750 000	937 500	198 200
- Jumlah Hari Kerja	480	1 760	2 205.5
- Pendapatan / orang	1 562.5	4 261.4	898. 9

Keterangan: *I* = Perairan Bagian Lebak Lubuk Lampam,  
*II* = Perairan Bagian Sungai Sarang Lang Pakuaji  
*III* = Perairan Bagian Sungai Lubuk Kemudi

Sumber: Nasution dan Dharyati (1999)

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa tindakan ekonomi yang sebelumnya terkait dengan hubungan sosial (*embeddedness*) yang dimiliki masyarakat nelayan yang menjadi hilang atau berkurang (tererosi) pada prinsipnya diperlihatkan pada Tabel 1. Beberapa contoh berikut merupakan tambahan penjelasan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat pedesaan tidak banyak dipertimbangkan lagi setelah masa tahun 1982 (mulai adanya sendi-sendi kapitalis). Contohnya, dalam menentukan anggota kelompok nelayan yang akan menggarap perairan dalam pelaksanaan penangkapan ikan secara berkelompok, biasanya dipilih kerabatnya terlebih dahulu dari pada orang lain, sehingga sistem bagi hasil yang dijalankan tidak terlalu dibedakan antara anggota yang satu dengan yang lainnya, kecuali ketua mendapatkan bagian yang lebih, sesuai dengan kesepakatan (masa Marga, sekitar 1982). Pada saat setelah 1982, anggota kelompok lebih banyak bersifat sebagai tenaga kerja upahan sesuai dengan spesialisasi pekerjaan. Sebagai contoh juru masak, juru dayung, juru jala hanya dipekerjakan untuk masa-masa tertentu saja dengan sistem upah. Sistem upah ini merupakan budaya kapitalis yang mulai masuk kepada kehidupan sosial masyarakat nelayan di wilayah ini.

Kemudian, dalam hal sumber keuangan nelayan guna membayar akses usaha penangkapan ikan di perairan ini, sebelumnya berasal dari berbagai pihak

kerabat dan keluarga, atau sesama anggota kelompok nelayan yang memiliki hubungan sosial. Pada masa setelah tahun 1982 semuanya diperhitungkan sebagai keberadaan modal awal seorang nelayan, jika ingin turut serta dalam keanggotaan kerja kelompok pada perairan yang dilelangkan. Dalam hal ini, tidak ada lagi tindakan ekonomi yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan atau kedekatan hubungan sosial. Bahkan, khusus pinjaman dari pedagang ada perjanjian yang dilakukan terhadap ikan hasil tangkapan, jaminan dan persyaratan lainnya yang pada prinsipnya memberatkan nelayan. Misalnya, isi perjanjian antara nelayan dan pedagang dalam pembelian perairan antara lain nelayan dianggap meminjam uang sebesar harga perairan yang telah ditambah “bunga uang” dengan jaminan rumah atau tanah. Pada masa sebelum tahun 1982, tidak ada jaminan untuk pinjaman uang sebagaimana tersebut, hanya saling percaya dengan memperhatikan hubungan sosial yang sebelumnya terjadi sesama warga masyarakat. Bahkan pada saat ini, pemilik modal tidak akan memberikan penggarapan suatu perairan kepada nelayan yang tidak punya rumah dan tanah perumahan, sebagai jaminan. Kemudian, ikan hasil tangkapan dari perairan tersebut harus dijual kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang (kreditur) untuk pembayar sewa perairan dan pembiayaan operasional penangkapan lainnya. Oleh karena itu, tidak jarang pada akhir tahun nelayan hanya menerima pendapatan yang sangat minim sekali, meskipun nilai ikan hasil tangkapan mereka sebenarnya cukup tinggi.

#### **4.3. Tindakan Ekonomi Bukan Lagi Tindakan Sosial**

Perubahan pola pengelolaan akses sumber daya perikanan perairan umum lebak lebug (PULL) berpengaruh besar terhadap adanya perkembangan (perubahan) ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perkembangan ekonomi ini yang pada akhirnya turut merubah struktur sosial dan pranata sosial di masyarakat pedesaan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan baru. Sebagai gambaran, perubahan pola pengelolaan sumber daya perikanan dari masa pemerintahan marga ke pemerintahan kabupaten mengakibatkan berbagai perubahan yang terkait dalam kehidupan masyarakat terutama nelayan di Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan bahwa hal-hal yang terkait dengan adanya tindakan ekonomi yang melekat dalam hubungan sosial sesama masyarakat nelayan hilang dengan adanya perubahan akses sumber daya perikanan PULL. Akibatnya dalam kehidupan masyarakat pedesaan pun hal tersebut berpengaruh. Hubungan sosial diantara anggota masyarakat semuanya telah menggunakan uang sebagai ukuran atau sarana pertukaran. Dengan demikian, perkembangan ekonomi pedesaan yang terjadi mengarah kepada struktur ekonomi kapitalis, yang semuanya diperhitungkan dengan uang atau barang berharga seperti emas. Kegiatan dan atau tindakan ekonomi yang sifatnya saling membantu semakin jarang terjadi diantara anggota masyarakat, bahkan jarang juga terjadi sesama keluarga besar (*extended family*). Saling

membantu, dalam kaitannya dengan tindakan ekonomi hanya terjadi diantara keluarga inti saja, meskipun dapat saja tidak terjadi, jika anggota keluarga inti masing-masing sudah memiliki keluarga.

Tabel 3 Gambaran akibat perubahan kelembagaan pengelola sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung terhadap kondisi status nelayan dalam komunitasnya di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Komponen Pemanding	Masa Pemerintah Marga (hingga 1982)	Masa Pemerintah Kabupaten (setelah 1982)
Tingkat pendapatan nelayan anggota kelompok yang menangkap ikan secara berkelompok pada perairan lebak lebung yang dilelangkan	<i>Besar kecilnya dipengaruhi hubungan anggota terhadap ketua baik hubungan darah atau hubungan kekerabatan saja. Hubungan darah mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kekerabatan saja. Tidak mempertimbangkan peranan dalam keanggotaan.</i>	Besar kecilnya tergantung peranan setiap anggota dalam kegiatan penangkapan dan kontribusi modal usaha pada awal tahun. <i>Tidak mempertimbangkan hubungan anggota terhadap ketua baik hubungan darah atau hubungan kekerabatan.</i>
Hubungan antara nelayan dan pedagang	Lebih mengutamakan hubungan yang bersifat kekerabatan, karena harga tidak ditentukan dari awal, hanya <i>saling percaya pada harga yang ditetapkan pedagang setelah ikan dijual ke kota.</i>	<i>Nelayan menjual ikan kepada pedagang merupakan kewajiban dan harga ditentukan sepihak oleh pedagang karena pedagang yang menguasai akses hak penangkapan ikan.</i>
Status nelayan pemenang lelang (pengemim) terhadap nelayan lainnya	<i>Pengemim berstatus sosial lebih tinggi daripada anggota nelayan pengemim dan dihargai sebagai orang berjasa kepada nelayan lain.</i>	<i>Pengemim tidak lagi merupakan orang yang berstatus lebih tinggi dari pada anggota nelayan. Pengemim tidak lagi berjasa kepada nelayan.</i>
Status nelayan pengemim diantara anggota masyarakat lainnya	<i>Nelayan pengemim dianggap berstatus sosial lebih tinggi daripada buruh tani, karyawan swasta, pedagang sembilan bahan pokok dan pedagang ikan.</i>	<i>Status sosial nelayan pengemim dianggap tidak lebih tinggi daripada karyawan swasta, pedagang sembilan bahan pokok dan pedagang ikan, tetapi lebih tinggi daripada buruh tani.</i>

Dengan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Desa Pedamaran, Kab. OKI ini, maka terlihat bahwa setiap tindakan ekonomi anggota masyarakat, termasuk nelayan bukan lagi merupakan tindakan sosial. Dengan kata lain, *tindakan ekonomi merupakan tindakan individu yang tidak lagi mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kecuali*

*hanya untuk hal-hal tertentu yang bersifat adat (kebiasaan) dan adat (kebiasaan) inipun pada prinsipnya merupakan suatu “prestise” dalam masyarakat setempat.* Sebagai contoh misalnya, adat atau kebiasaan sejenis kue pada hari Raya Idul Fitri yang harganya cukup mahal (semacam lapis legit), meskipun anggota masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi, mereka memaksakan diri untuk mengadakannya, pada Hari Raya tersebut.

Contoh lainnya adalah hilangnya sistem pertukaran tradisional dalam membangun rumah kediaman yang biasanya dilakukan dengan cara gotong-royong, Saat ini, harus dilakukan dengan cara sistem upah. Artinya sistem hubungan sosial gotong royong dalam masyarakat, telah digantikan dengan sistem upah yang merupakan budaya sistem ekonomi kapitalis. Pola transaksi tenaga kerja tradisional yang berbasiskan *etika-altruisme* (tanpa pamrih) pada jejaring sosial lama (gotong-royong) telah tergantikan dengan pola transaksi ekonomi baru (sistem upah) yang mengakibatkan adanya distorsi sistem pada sistem pertukaran tradisional.

## **5. Penutup**

Semula, akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan dikelola oleh pemerintah Marga (sampai dengan tahun 1982) berubah menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (setelah tahun 1982 hingga saat ini). Dampaknya adalah terdapatnya berbagai kepentingan terhadap akses pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut, maka yang langsung terlihat adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Bahkan, pendapatan masyarakat nelayan di wilayah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan upah buruh harian. Kemudian, dengan semakin menurunnya pendapatan masyarakat nelayan, maka tindakan ekonomi yang melekat (*embeddedness*) dalam hubungan sosial pada masyarakat pedesaan Pedamaran yang selama masa pemerintahan Marga banyak berlangsung dan membudaya menjadi hilang. Bahkan tindakan ekonomi yang melekat (*embeddedness*) dalam hubungan sosial sesama masyarakat nelayan juga hilang atau tererosi.

Berbarengan dengan perkembangan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Pedamaran yang berubah dari sistem ekonomi berbudaya tradisional menjadi berbudaya ke arah ekonomi kapitalis, terlihat bahwa setiap tindakan ekonomi anggota masyarakat, termasuk nelayan sebagian besar bukan lagi merupakan tindakan sosial. Tindakan ekonomi merupakan tindakan individu yang tidak lagi mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kecuali hanya untuk hal-hal tertentu yang bersifat adat (kebiasaan) dan adat (kebiasaan) inipun pada prinsipnya merupakan suatu “prestise” dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan nelayan tersebut dari berbudaya tradisional kearah berbudaya kapitalis.

Kemudian terlihat pula bahwa perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran mengakibatkan hilangnya (tererosinya) ikatan sosial kemasyarakatan pada komunitas pedesaan nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (*embeddedness*) dalam tindakan ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Z. dan Ondara, 1982, Pengelolaan perikanan di perairan umum Lubuk Lampam, Prosiding Puslitbang Perikanan No. 9/SPPU/1981, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Arsyad, M. N., 1982. Peranan hukum adat dalam pengelolaan perikanan di perairan umum Sumatera Selatan, Prosiding Puslitbangkan No. 1/SPPU/1982, Hal.11-16. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Damsar, 2002. Sosiologi Ekonomi. *Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dinas Perikanan Kabupaten OKI, 1992. Laporan Tahunan Tahun 1992. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kayu Agung.
- Dharmawan, A. H. 2007. Teori Tindakan Ekonomi: Perspektif Sosiologi Ekonomi Klasik dan Kontemporer. Materi Kuliah Sosiologi Ekonomi Pedesaan. Program Studi Sosiologi Pedesaan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Granovetter, Mark. 1992. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness dalam M. Granovetter dan R. Swedberg (Eds). *The Sociology of Economic Life*. pp. 53-81. Westview Press Inc. Boulder-San Fransisco-Oxford.
- Gravovetter, Mark and Richard Swedberg (Ed), 1992. *The Sociology of Economic Life*, Westview Press Inc. Boulder-San Fransisco-Oxford.
- Hindess, Barry (Ed). 1978. *Sociological Theories of the Economy*. The Macmillan Press Ltd. London.
- Holton, R. J. 1992. *Economy and Society*. Routledge. London and New York.
- Nasution, Z. 1990. Lelang Lebak Lebung Atur Nelayan. *Harian Pagi Sriwijaya Post, Palembang 21 Mei, 1990*.
- Nasution, Z., A.D. Utomo dan D. Prasetyo, 1992, Sosial ekonomi dan pemasaran ikan perairan umum lebak lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Prosiding TKI Perikanan Perairan Umum, Palembang 12-13 Februari 1992, Puslitbang Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

- Nasution, Z., Z. Arifin, M. F. Sukadi dan F. Cholik, 1995. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sumber daya Perikanan Melalui Lelang Lebak Lebung di Sumatera Selatan. Laporan Penelitian Kerjasama Puslitbang Perikanan, Departemen Pertanian Jakarta dan University of Bath, London, UK. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Nasution, Z. dan E. Dharyati. 1999. Dampak Lelang Perairan terhadap Ekonomi Nelayan di Sungai Lempuing, Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Nizar, M. 2005. Evaluasi Sistem Pengelolaan Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Departemen Manajemen Sumber daya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soemardjan, Selo dan Kennon Breazeale. 1993. Cultural Change in Rural Indonesia. Sebelas Maret University Press in Cooperation with Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta dan East-West Center. Honolulu.
- Sripo (Sriwijaya Post), 2002. Permintaan Warga Rawangkalong Sulit Dikabulkan. *Sriwijaya Post Online Sabtu, 30 November 2002*. Kayu Agung (diakses tanggal 2 Februari 2007).
- Smelser, Neil J. dan R. Swedberg, 1994 (Eds). *The Handbook of Economic Sociology*. Princenton University Press. Princenton. UK.
- Swedberg, Richard (Ed). 1996. *Economic Sociology. An Elgar Reference Collection*. Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham, UK – Brookfield. US.
- Swedberg, Richard. 2000. *Principles of Economic Sociology*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey. UK.
- Welcomme, R. L., 1979. *Fisheries Ecology of Floodplain Rivers*. Longman Group Limited. London.
- Zain, I.H., 1982. Status Perikanan Perairan Umum di Sumatera Selatan. Prosiding Puslibangkan No .1/ SPPU /1982 . Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.